

ABSTRAK

Sy. Dwi Asmalidia (2017): “Pelaksanaan Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 70/HK-010/B5/2001 di Kabupaten Indragiri Hulu”

Pasal 38 Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/ B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa “BKKBN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun pada Kabupaten Indragiri Hulu belum terealisasi, hal ini di buktikan dengan masih rendahnya perhatian masyarakat untuk mengikuti program KB, serta masih kekurangan sarana dan prasarana yang tersedia.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan program keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB) di Kabupaten Indragiri Hulu, serta apa hambatan dalam Pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan program keluarga dan pembangunan terhadap keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Indragiri Hulu.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera pada BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan KB, dan pembangunan keluarga sejahtera pada BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan tugas pengendalian dan pengelolaan Keluarga Berencana (KB) pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) di Kabupaten Indragiri Hulu, dilihat dari segi pengendalian perkembangan penduduk belum memuaskan karena jumlah penduduk terus meningkat, dilihat dari pengelolaan Program KB, bahwa perhatian masyarakat menurun terhadap program KB, serta dilihat dari pembangunan keluarga sejahtera, bahwa BP3AKB terus mengupayakan agar masyarakat memahamai KB untuk membentuk keluarga sejahtera.

Sedangkan Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada BP3AKB di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu kurang mendapat dukungan dari masyarakat, namun BP3AKB berusaha untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi, kemudian sarana dan prasarana yang belum memadai, karena membutuhkan peralatan yang cukup banyak dalam melayani masyarakat sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Serta sumber daya manusia yang masih kurang, terutama yang berhubungan dengan tenaga yang memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat sampai ke desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.